

DAFTAR PUSTAKA

Buku Nasional

- Alfin, Sulaiman. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2011)
- Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI, *Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2014 (Audited)*, (Jakarta: Kejaksaan Agung, 2014)
- BN, Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2002)
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 040/KMA/III/2010
- Gresnews, “Menagih Janji Kejagung Eksekusi Tunggakan Uang Pengganti Korupsi”, <https://gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejagung-eksekusi-tunggakan-uang-pengganti-korupsi> , diakses 11 Juli 2021
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 2000)
- Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I
- Hukum Online, “Eksekusi dan Masalah Tanggung Renteng”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol14214/uang-pengganti-2--eksekusi-dan-masalah-tanggung-renteng?page=1> , diakses 10 Juli 2021
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012)

- Jam Datun, Himpunan Petunjuk Jaksa Agung muda Perdata dan Tata Usaha Negara XXII, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1997)
- Kansil, C.S.T. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Kejaksaan Agung RI, Penguatan Kelembagaan Sentra Diklat Dalam Mendukung Sumber Daya Manusia Kejaksaan, (Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung, 2015)
- Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara”, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2000
- Kejaksaan RI, “Epiutang Kejaksaan RI” <http://www.epiutang.kejaksaan.go.id> diakses pada tanggal 11 April 2021
- Kholis, Eti Laila. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, (Jakarta : Solusi Publishing, 2010)
- Kristiana, Yudi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Hukum Progresif, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016)
- Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2014.
- Lexy. J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000)
- Marsita, B.S. Sri. Optimalisasi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2016)
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2009)
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004)
- Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Nawawi Arief, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)

- Pasek Diantha, I Made. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2017)
- Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung : Nusa Media 2010)
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1396/K/Pid/1994
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Rahardjo, Satjipto. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, cetakan kedua (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Rosidi, Ajjp. Korupsi dan Kebudayaan, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009)
- S, Supardi. Perampasan Harta Hasil Korupsi; Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018)
- Seksi Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM, “Ketentuan Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”, <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UangPengganti.pdf> , diakses 10 Juli 2021
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : Rajawali Pers, 2001)
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984)
- Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti
- Tjandra, W. Riawan. Hukum Keuangan Negara, (Jakarta : Grasindo, 2006)
- Utari, Indah Sri. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012)
- Waluyo, Bambang. Kapita Selekta Tindak Pidana, (Jakarta: Miswar, 2011)

Buku Internasional

- Kagan, Robert.A. Introduction to Transaction Edition, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition Towards Responsive Law, (New Jersey:Transcation Publishers, 2001)
- Kimberly, Ann Elliott, Korupsi dan Ekonomi Dunia, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999)
- Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi. (Jakarta : Obor Indonesia, 2001)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Op.Cit, Pasal 1 angka 1.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1396/K/Pid/1994